

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 27, BD 2025/NO. 75, 153 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat serta menyederhanakan regulasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu menggabungkan seluruh peraturan Kepala Daerah mengenai Rumah Sakit Umum Daerah yang sebelumnya tersebar dalam beberapa peraturan kepala daerah menjadi satu regulasi yang lebih sederhana dan terpadu.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; PP No. 47 Tahun 2021; PERPRES No. 77 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENPANRB No. 7 Tahun 2022; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 13 Tahun 2014.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur dibentuknya rumah sakit umum daerah terdiri atas RSUD Aji Muhammad Parikesit yang merupakan rumah sakit umum kelas B, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang merupakan rumah sakit umum kelas C, RSUD Dayaku Raja yang merupakan rumah sakit umum kelas D, dan RSUD Aji Muhammad Idris yang merupakan rumah sakit umum kelas D. Selain itu mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta tata kerja rumah sakit umum daerah pada Dinas Kesehatan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku tanggal diundangkan 14 Juli 2025.
 - Pada saat Perbup ini berlaku maka Perbup No. 56 Tahun 2022, Perbup No. 57 Tahun 2022 dan Perbup No. 58 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Perbup ini.
 - Lamp : 4 Hlm.